



RISALAH RESMI

Tahun : 2019
 Jenis Rapat : Rapat Paripurna
 Sifat Rapat : Terbuka
 Hari / Tanggal : Senin 29 April 2019
 Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
 Pimpinan Rapat : H. KAMAL.HG/ Wakil Ketua DPRD
 Acara : Rapat Raripurna Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018. secara Resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
 Hadir : A. 23 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. Fraksi Demokrat

4 dari 6 orang Anggota

2. Fraksi Golkar

3. 4 dari 5 orang Anggota

4. Fraksi Hati Nurani

3 dari 4 orang Anggota

5. Fraksi PDI-Perjuangan

4 dari 4 orang Anggota

6. Fraksi PAN

1 dari 3 orang Anggota

7. Fraksi Gerindra

2 dari 3 orang Anggota

8. Fraksi PKS

2 dari 3 orang Anggota

9. Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

4 dari 4 orang Anggota

10. Fraksi Bintang Pembangunan

2 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

Turut Hadir :

1. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
2. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo.
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
5. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
6. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
8. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
9. Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD, wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak H.KAMAL, HG disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : H. KAMAL, HG / Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo
(Rapat di buka pukul 09.00 Wib)

Bismillahirrohmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;

- Yth. Sdr. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo.
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Para Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo,
- Yth Para Camat, Lurah, serta hadirin sekalian yang berbahagia, nan kecik idak disebut namonyo, nan gedang idak disebut gelarnyo.

Hadirin para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia...

Dalam menjalankan amanah serta tugas kelembagaan yang diemban, marilah kita bersama mengawali kegiatan hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas

limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di ruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menyelesaikan suatu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bungo. Serta Sholawat beriringan salam untuk panutan kita Nabi Muhammad SAW.

Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- Saudara Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan Kepada kami untuk menyampaikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018.
- Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Penjelasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 pada Paripurna yang lalu Tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan hingga melahirkan rekomendasi DPRD Kabupaten Bungo pada hari ini.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun Anggaran sebagaimana gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah dan pengendaliannya ditunjang oleh seluruh stakeholders. Adapun ruang lingkup LKPJ mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk Pendapatan Belanja Daerah, penyelenggaraan urusan desentralitas, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi yang salah satunya adalah fungsi

pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 153 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Rekomendasi DPRD Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1). Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhannya tertuang dalam LKPJ.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rekomendasi ini disusun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 13 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa DPRD dalam melakukan pembahasan LKPJ memperhatikan:

- a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. Pelaksanaan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No. 13 Tahun 2019 ditentukan bahwa Rekomendasi DPRD tersebut dipergunakan sebagai bahan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang pada akhirnya mendorong percepatan terwujudnya Bungo Maju dan Sejahtera.

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati

Merujuk kepada uraian diatas, maka setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018, dan kemudian setelah melakukan pengkajian di internal Fraksi- Fraksi dan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bungo yang menghasilkan beberapa catatan strategis yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kabupaten Bungo yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah kedepan, catatan sebagaimana dimaksud meliputi :

A. URUSAN WAJIB :

1. Pendidikan

Pada bidang Pendidikan hampir semua kegiatan terlaksana dengan baik, baik itu sarana maupun prasarana. Namun dalam hal ini kami minta kepada Pemerintah Daerah agar pemerataan dibidang pendidikan tidak hanya fokus kepada pemerintah semata, tapi juga pada lembaga pendidikan swasta yang menurut hemat kami selama ini kurang menampakkan perhatian seperti pada pondok pesantren. Hal ini penting kami sampaikan mengingat tidak semua anak usia sekolah bisa ditampung oleh pendidikan negeri agar ada keseimbangan dan pemerataan dalam dunia pendidikan. Kemudian dari pada itu kami juga minta kepada pemerintah daerah untuk tidak memindahkan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya tenaga pendidik yang telah ditetapkan berdasarkan penempatan tugas atau SK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum waktu yang telah ditentukan sesuai dengan SK atau peraturan yang berlaku.

2. Kesehatan

Pada urusan kesehatan kami merekomendasikan pemerataan dan evaluasi tenaga kesehatan, karena masih kita ditemui di beberapa Puskesmas pada wilayah yang jauh dari kota yang tenaga medisnya tidak berada ditempat, untuk itu kami minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini karena hal ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam hal ini kami mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan program-program yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

yang secara keseluruhan anggaran untuk Tahun 2018 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 21. 437.623.747,00 dan serapan anggaran sebesar Rp. 19.167.742.734,00 atau 89,41%. Yang mana untuk kegiatan fisik telah berhasil terealisasi sebesar 95,35 %. Tapi pada kesempatan ini kami minta kepada OPD Perumahan dan kawasan Permukiman agar lebih jeli lagi dalam memperhatikan titik-titik pemasangan lampu jalan yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian lampu-lampu jalan yang sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi untuk segera diganti atau diperbaiki.

4. Lingkungan hidup

Pada OPD Lingkungan Hidup ada 4 (empat) program dengan 16 (enam belas) kegiatan yang mana ada 2 (dua) kegiatan yang capaiannya hanya 65,40 % pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Dan 58,13% pada kegiatan Penataan Hukum Lingkungan dalam Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Untuk itu kami berharap agar capaian yang belum maksimal ini menjadi **PR** bagi kita semua khususnya OPD Lingkungan Hidup bagaimana kedepannya serapan anggaran akan terealisasi seperti yang sudah dianggarkan.

5. Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Disini kami melihat ada beberapa kegiatan yang sisa dananya cukup banyak dari yang dianggarkan meskipun secara fisik terealisasi 100 %, untuk itu kami minta kedepannya agar dalam perencanaan dan penganggaran dana untuk lebih diperhatikan dan dipertimbangkan kembali.

6. Sosial

Pada OPD Sosial ada beberapa program yang kegiatan-kegiatannya terkendala karena kurangnya personil yang berkualitas, sehingga ada beberapa kegiatan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan yang berdampak pada serapan anggaran yang tidak tercapai. Untuk itu kami minta agar hal semacam ini segera diatasi, salah satunya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada personil.

7. Tenaga Kerja

Program-program yang dibuat oleh ketenagakerjaan hampir seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik rata-rata diatas 90 %, namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah pengangguran yang ada di

kabupaten Bungo, kami melihat masalah pengangguran di kabupaten Bungo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah pengangguran, tapi pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Kami berharap agar pemerintah daerah mampu menarik investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Bungo sehingga terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

8. Ketahanan Pangan

Pada OPD Ketahanan pangan secara garis besar kami melihat banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi diatas 90%, namun pada kesempatan ini kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk lebih meningkatkan kegiatan ketahanan pangan khusus bagi ibu rumah tangga dalam bentuk pemanfaatan lahan pekarangan rumah masyarakat. karena program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rumah tangga.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Demi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di Pemerintah Dusun, terkait pemilihan Rio, BPD serta Penggunaan Dana desa. Untuk itu Pemerintah Daerah untuk lebih melakukan pembinaan/sosialisasi kepada Aparat Desa/Dusun mengenai system dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat peruntukannya. Salah satu contoh di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang mesin penghancur sampah dianggarkan melalui dana desa sampai saat ini masih belum dimanfaatkan. Mohon tindakannya.

10. Perhubungan

Secara umum kegiatan-kegiatan yang ada pada sektor Perhubungan sudah terealisasi sesuai dengan yang diharapkan, tapi pada kesempatan ini ada beberapa catatan untuk dijadikan perhatian :

- a. Perlu pengadaan Armada angkutan umum dalam kota untuk Pelajar/Mahasiswa/Umum yang menurut hemat kami bisa mengurangi permasalahan tidak tercukupinya lokasi parkir karena banyaknya kendaraan pribadi. hal ini juga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas.
- b. Fasilitas rambu-rambu lalu lintas harus segera dipenuhi dengan skala prioritas terutama di daerah yang rawan kecelakaan.
- c. Masih banyak Portal jalan yang belum dimanfaatkan agar segera dioptimalkan karena hal ini telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Usaha KSP/ USP yang mengatasnamakan Koperasi harus diadakan pengawasan dilapangan, dalam hal ini bekerjasama dengan instansi lain terkait regulasi yang mengaturnya agar konsumen/anggota terlindungi.
- b. Pendampingan pada pelaku usaha masih sangat perlu ditingkatkan dari perizinan dan akses pemodalan, sehingga dapat berkompetisi dengan pengusaha besar.
- c. Pemerintah Daerah harus memberi jaminan kepada pelaku UMKM berupa kebijakan yang berpihak agar dapat mengantarkan masyarakat Kabupaten Bungo untuk tumbuh dan berdaya di daerahnya sendiri.

B. URUSAN PILIHAN :

Ditengah gencarnya upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan hasil pertanian, kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata ini dibuktikan dengan besarnya anggaran dibidang masing-masing. Untuk itu kami menyarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif menyerap anggaran pusat sesuai dengan sektornya masing-masing. Sejauh ini menurut hemat kami pemerintah daerah masih kurang melakukan komunikasi yang baik pada pemerintah pusat, jika hanya tergantung pada dana APBD saja maka semua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak akan tercapai.

Kemudian khusus pada sektor Perindustrian, kami minta agar pendampingan terhadap pelaku wirausaha untuk lebih di maksimalkan dan pemberian pelatihan dibidang industry harus lebih terarah pada industri unggulan, contohnya industri Batik Bungo yang sudah mulai berkembang.

C. URUSAN PENUNJANG :

Pada urusan penunjang yang meliputi Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian secara umum pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo tahun 2018, kami mengapresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini saudara Bupati dan Jajarannya yang telah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan konstitusi, namun dalam hal ini ada beberapa catatan serta saran sebagai berikut :

- a. Administrasi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan memang tidak terjadi permasalahan, hanya saja anggaran jasa kerja masih bersifat insidentil sehingga tidak dapat dipastikan besaran anggaran yang terserap. Kami menyarankan kepada Pemerintah daerah agar dilakukan evaluasi seluruh kinerja Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

- b. Fungsi Inspektorat pada penyelenggara Reformasi Birokrasi dan Pendampingan, Perangkat Daerah yang harusnya menjadi penanggung jawab kegiatan ini belum optimal melaksanakan kegiatan tersebut.
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut hemat kami harus memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri yang dimaksud antara lain perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif, ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, berisi upaya melakukan struktur perekonomian, mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja dan adanya pemerataan pembangunan.
- d. Dalam hal penempatan Pejabat dan Pangkat Daerah hendaknya penempatannya berdasarkan pola-pola yang lazim diterapkan dalam manajemen organisasi, yaitu The Right Man on the Right Place. Hal ini penting kami sampaikan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi mutasi beberapa Pejabat di beberapa OPD dan masih banyak ASN yang belum dikembalikan ke posisi yang sesuai dengan Pangkat dan Jabatannya. Untuk itu agar segera ditindak lanjuti karena hal ini juga sudah direkomendasikan oleh KASN Ombusman.

Demikianlah beberapa catatan strategis yang tertuang dalam Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah, yang mana Rekomendasi ini adalah rangkaian dari berbagai aspirasi, informasi serta hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bungo untuk menjadi masukan bagi upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Semoga rekomendasi ini menjadi masukan yang konstruktif dan sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja aparatur untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas salah dan khilaf dalam penyampaianya.

Sebelum ditutup, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun.

**Burung pipit lah terbang tinggi
Hinggap didahan sipohon kenari
Apopun nan di raso dibadan kini
Amanah rakyat tetap kito jalani**

**Nak duo pantun seiring
Anak ayam turun Sembilan
Mati satu tinggal delapan
Meskipun disisa masa jabatan
Kemajuan negeri tetap kita upayakan**

**Wabillahi taufikwalhidayyah
Assalammualaikum warrahmatullahi wabarakatuh..**

**Bupati Bungo : H. MASHURI, SP, ME
Bismillahirrohmaanirrohim**

Assalamualaikum Wr. Wb,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yang Terhormat :

- Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;
- Sdr. Wakil Bupati Bungo;
- Rekan-Rekan Unsur FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Sdr. Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD Kabupaten Bungo dan Para Kabag Setda Kabupaten Bungo;
- Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan Bank beserta pimpinan BUMN/BUMD dalam Kabupaten Bungo;
- Insan pers, para hadirin dan undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, tak terasa satu tahun berselang, pada hari ini, dalam agenda yang sama, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bungo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018.

Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dan terus memberi inspirasi kepada umatnya Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, tak terasa satu tahun berselang, pada hari ini, dalam agenda yang sama, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bungo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018.

Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dan terus memberi inspirasi kepada umatnya.

Karenanya **kami mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo** atas penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Bungo terhadap LKPJ Bupati Bungo Tahun Anggaran 2018 yang hari ini telah kita dengarkan.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia

Sepanjang tahun 2018, cukup banyak kinerja Pemerintahan Daerah yang telah disepakati kita raih bersama, walaupun tidak semua harapan itu dapat kita capai secara optimal serta dipersepsikan sama oleh segenap pemangku kepentingan. Namun satu hal yang pasti, kita diajarkan bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat, yang harus kita sikapi secara arif dan bijak. Kami juga akan berusaha membangun komitmen yang utuh, mengkaji seluruh catatan strategis yang disampaikan legislatif dalam rekomendasi, guna ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan kebijakan peningkatan kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Kami pun berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai kendala yang bersifat internal, untuk itu saya meminta kepada seluruh Perangkat Daerah agar bekerja lebih keras lagi dan senantiasa meningkatkan kinerja serta kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat guna peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah akan terus berupaya lebih baik dari tahun ke tahun, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penggunaan APBD yang berdasar pada RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia

Kami berharap, kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif, tetap berjalan dengan baik dan lebih bisa menemukan bentuk ideal bagi keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Bungo ke depan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan bathin karena lebih kurang satu minggu lagi kita akan menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 Hijriah/2019 Masehi dan perkenankanlah saya menyampaikan pantun seiring sebagai berikut :

Pegi keumo naik perahu

Dalam telago lesat melaju

Mari besamo bahu membahu

Untuk Bungo nan lebih maju

**Nak duo pantun seiring,
Kilang disawah betanam semangko
Darilah tebing ketepian Danto
Hilangkan salah dan sangko
Mari membangun Bungo tercinto**

**Nak tigo pantun seiring,
Di Senamat parang beradu
Seni mengapak kayu gaharu
Selamat, kembali bersatu padu
Kini bukak lembaran baru**

**Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.**

Pembaca Do,a : IBNU HAJAR, SH.I.

**Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini
terimakasih
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.**

Muara Bungo 29 April 2019

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,


H. KAMAL, HG